



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM**

**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang juga dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kewajiban perangkat daerah dalam meletakkan dasar-dasar perencanaan infrastruktur, sistematis dan terarah sebagai tindak lanjut dokumen RPJMD Kota Batam.

Dengan mengacu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 yang berisi terkait program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam untuk 1 (satu) tahun.

Demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2025 disusun sebagai bahan acuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan lainnya. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2025.

Batam, 11 Juli 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM



RUDI PANJAITAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
III.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

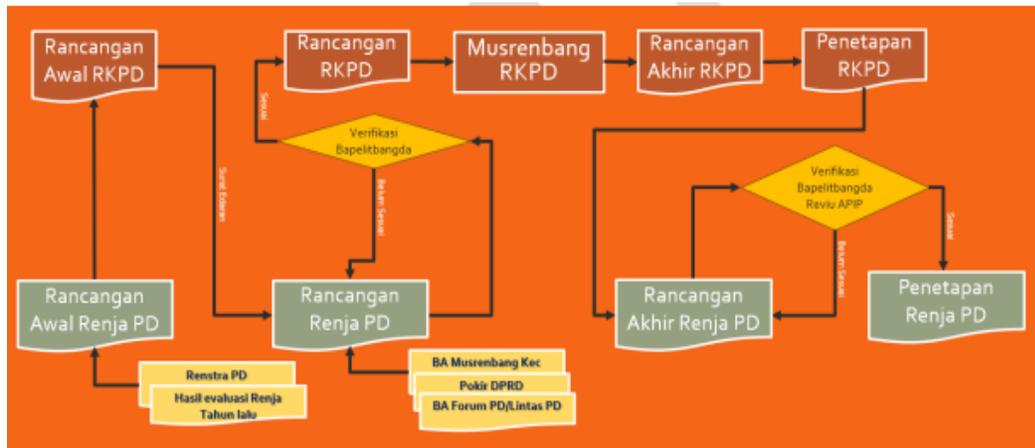
I.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan tahapan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal system perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan SKPD. Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan Pemerintahan bidang statistik dan urusan Pemerintahan bidang persandian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. perumusan rancangan akhir Renja
- e. penetapan Renja.



Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPd. Sedangkan RKPd dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-5 (lima) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”***

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”***

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 225 Tahun 2023 Tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026.
19. Perwako Tusi Dinas Komunikasi dan Informasi.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2025, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Review terhadap Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD)
- II.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota seperti :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
2	16	0 1	2.0 1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	
2	16	0 1	2.0 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 ASN	34 ASN	40 ASN	38 ASN	100%	82 ASN	82 ASN	100%
2	16	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	0	0	0	0	0	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	16 0 1 2.0 5 0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 ASN	0	0 ASN	0 ASN	0%	0 ASN	0 ASN	0%
2	16 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16 0 1 2.0 6 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16 0 1 2.0 6 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
2	16 0 1 2.0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2	16 0 1 2.0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16 0 1 2.0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 tahun	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	16 0 1	2.0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	16 0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	12 unit	40 unit	40 unit	100%	0	40 unit	100%
2	16 0 1	2.0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%
2	16 0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	16 0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	16 0 1	2.0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 16 0 2.0 0 1 9 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2 16 0 2.0 0 1 9 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka Pajaknya	8 unit	6 unit	6 unit	4 unit		7 unit	7 unit	87.5%
2 16 0 2.0 0 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	66 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
2 16 0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	74.59	76.66	74.59		100%	74.59	74.59	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota									
2	16 0 2 2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	6 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16 0 2 2.0 0	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	0	2.0	0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	22.081 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16	0	2.0	0	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16	0	2.0	0	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan	1 layanan	2 layanan	2 layanan	100%	3 layanan	3 layanan	100%
2	16	0	2.0	0	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Penyediaan/Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45 unit	0	0	0	0	27 unit	27 unit	60%
2	16	0			PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai	3.00; 4.00; 4.00	3.90; 3.60; 3.33	3.00; 3.40; 3.16	3.90; 3.60; 3.33	96.67%; 100%; 100%	3.00; 3.40; 3.16	3.00; 3.40; 3.16	100%; 85%; 79%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik											
2	16 0 3	2.0 1			244	205	100%	244	244	92.42%			
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	264	223	244	205	100%	244	92.42%			
2	16 0 3	2.0 1	0	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Domain	6 domain	8 Domain	8 Domain	66,67%	9 Domain	8 Domain	80%
2	16 0 3	2.0 1	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16 0 3	2.0 1 3	0	0	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	33 Unit	13 unit	13 Unit	13 Unit	100%	27 Unit	27Unit	81%
2	16 0 3	2.0 2	0	0	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 ; 4.00	1.25; 3.25	3.25; 3.00	1.25; 3.25	100% ; 81.81%	3.25; 3.25	3.25; 3.25	81%;
					Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
2	16 0 3	2.0 2	0	0	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	2 dokumen	0	0	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 16 0 2.0 0 3 2 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	100%
2 16 0 2.0 0 3 2 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 16 0 2.0 0 3 2 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 unit	37 unit	38 unit	38 unit	100%	39 unit	39 unit	97.5%
2 16 0 2.0 0 3 2 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	0 3	2.0 2	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	0 2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3.00; 3.00	1.00; 5.00	3.00; 3.00	1.00; 5.00	100%	3.00; 3.00	3.00; 3.00	100%; 100%
2	21	0 2	2.0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	85.83%	45.83%	63,75%	63.75%	100%	63,75%	85.83%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	0	0	0	0	0	0			
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 laporan	0	0	0	0	0	0			
2	21	0 2 1 3	0 2.0 1 3	0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%
2	21	0 2	2.0 1 4	0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
2	21	0 2	2.0 2		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	100%	0	0%	0	0	0%	100%	
2	21	0 2	2.0 2	0 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	2 Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	100%	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	20	0 2	2.0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	20	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	1 Dokumen	100%
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
					Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10 orang	0	0	0	0	0	0	0

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat diberikan dalam bentuk Indikator Kinerja Program (outcome) maupun kegiatan (output) terhadap kebutuhan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indeks Kinerja dengan menyampaikan rasio ketercapaian target Renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2023-2026, terhadap realisasi data tahun berjalan data proyeksi tahun berikutnya.

Sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, menjadi objek yang dilakukan analisis dalam berbagai aspek, sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi pencapaian program dimaksud .

Lebih rinci dapat dilihat dalam table 2.2 dan 2.3 pada dokumen ini untuk mendapatkan gambaran analisis keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	√	74.59%	74.59%	74.59%	74.59%	76,82%	-	74.59%	74.59%	Dilakukan penilaian dari jumlah pengunjung di website batam.go.id. Terdapat penambahan Tingkat partisipasi kunjungan ke laman yang
2	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan mendapat penyebaran informasi publik, baik melalui media, maupun pelaksanaan kegiatan secara langsung di setiap Kecamatan
3	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	-	3.00; 3.50; 3.16	3.00; 3.90; 4.00	3.00; 4.00; 4.00	3.00; 4.00; 5.00	3.60;4.20;4.5 0	-	3.00; 4.00; 4.00	3.00; 4.00; 5.00	Nilai diperoleh dari LHE indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
4	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah	-	-	244	254	264	274	205	-	264	274	Terjadi perubahan regulasi dari Pusat, sehingga target tidak tercapai.

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	(berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)											Jumlah layanan yang sudah disiapkan dilakukan penyesuaian dengan
5	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	-	-	3.25; 3.25	3.25; 3.50	3.25; 4.00	3.50; 4.00	3.25;4.25	-	3.25; 4.00	3.50; 4.00	Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Seluruh OPD menggunakan data statistik sektoral dalam urusan perencanaan dan evaluasi
7	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Tersedianya data semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
8	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	-	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	Nilai diperoleh dari LHE indek SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB
9	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	-	-	63.75%	79.17%	85.83%	100%	63.75%	-	85.83%	100%	Instrumen Penyelenggaraan Keamanan Informasi yang terlaksana meliputi: 1

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
												Peraturan Walikota, 2 SOP, 3 sertifikasi peningkatan kompetensi SDM, 3 kegiatan kontra penginderaan, 1 kegiatan evaluasi Indeks KAMI, dan 1 kegiatan IT Security Assessment, kegiatan pendaftaran aktivasi penerbitan dan pendampingan teknis terkait tanda tangan elektronik.
10	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	-	√	57.14%	71.43%	85.71%	100%	-	-	85.71%	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan

Tabel 2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola manajemen, dan layanan SPBE	1. Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 2. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3. Nilai Indeks Doman Layanan SPBE 4. Nilai Indeks Doman Manajemen SPBE	3.00 3.30 3.93 2.81	-	-
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	74,59%	-	-

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Diskominfo Pemerintah Kota Batam yaitu :

1. Rencana induk, arsitektur dan kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyalarsan, penyiapan, implementasi dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
3. Pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Pengelolaan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya;
5. Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum terlaksana secara optimal;
6. Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal bahkan cenderung parsial dan sektoral.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPDP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Batam	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00 4.00 5.00	6.464.968.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Batam	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00 4.00 5.00	6.079.294.580	
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	274	2.704.425.000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	274	64.824.680	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 4.00	4.196.460.000	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 4.00	6.014.469.900	
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Batam	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3.00	116.761.050	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Batam	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3.00	383.236.000	
	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		3.00	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi				3.00			
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Batam	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk	85.83%	109.226.009	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Batam	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk	85.83%	381.436.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian Keamanan Informasi Pemda			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian Keamanan Informasi Pemda			
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	85.71%	3.228.050	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	85.71%	1.800.000	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Batam	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	214.493.472	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Batam	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	267.077.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	214.493.472	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	267.077.000	
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Batam	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,59%	8.584.855.273	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Batam	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,59%	9.045.116.050	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	8.584.855.273	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	9.045.116.050	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	11.258.460.626	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	20.114.649.858	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9.430.042.064	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	18.325.694.748	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	287.713.031	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	351.674.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	252.713.031	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	209.338.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	1.033.123.749	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	1.053.479.410	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	103.421.625	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	23.635.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	315.978.401	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	360.165.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui Musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

Telaahan usulan dari berbagai kepentingan yang masuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2025 Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang kelima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan persiapan 5 (lima) program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Tanah Air menjadi masyarakat digital.

Kelima program tersebut terdiri dari:

- Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Pengelolaan spektrum frekuensi;
- Pemanfaatan TIK;
- Penataan Pos dan Informatika;
- Komunikasi Publik.

Dengan adanya pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital nasional. Selain itu Kemenkominfo melakukan percepatan infrastruktur dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) serta akses internet di wilayah non-komersial. Kemenkominfo juga melakukan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik. Kemenkominfo juga menargetkan seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia sudah terjangkau dengan layanan 4G. Dan menargetkan 25% dari total pengguna smartphone saat ini di Indonesia menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.sumber; Medcom.id.

Sehubungan dengan 5 program Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Batam berperan dalam 3 program yaitu Program Pemanfaatan TIK dan program Komunikasi Publik. Hal ini sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dimana untuk program pemanfaatan TIK melekat menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yaitu indeks SPBE. Dimana Kota Batam pada Tahun 2022 memperoleh nilai indeks tertinggi se Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks 2,85. Sementara untuk program Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam melakukan kerjasama dengan media, melaksanakan PPID dan pada tahun 2023 telah dibentuk PBNN (Pemko Batam News Network) untuk mendukung pelaksanaan program Komunikasi Publik di pemerintah Kota Batam.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam table 3.1.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi,	Nilai Indeks SPBE	3.66
2	Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola manajemen, dan layanan SPBE	a. Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, b. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE c. Nilai Indeks Doman Layanan SPBE d. Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	3.00 3.30 3.93 2.81
3	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi public	74,59%

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mencukung pencapaian Misi **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”** Kota Batam Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung 6 kegiatan meliputi :
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 2 kegiatan terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 2 kegiatan terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Untuk rumusan rancangan program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat dalam table 3.2

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	16.	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE;	Batam	3.00	6.079.294.580	APBD		3.00	7.457.663.600
						2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		4.00				4.00	
						3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		4.00				5.00	
2.	16.	03.	2.	01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain DiLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah	Batam	264	64.824.680	APBD		274	64.922.800
2.	16.	03.	2.	02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola	Batam	3.25	6.014.469.900	APBD		3.50	7.392.740.800
						2.Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola		4.00				4.00	
2.	21.	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Batam	3.00	383.236.000	APBD		3.00	118.257.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal		3.00				3.00	
2.	21.	02.	02.	01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	Batam	85.83%	381.436.000	APBD		100%	107.933.000
2.	21.	02	2	02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	Batam	85.71%	1.800.000	APBD		100%	10.324.000
2.	20.	2			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam Perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Batam	100%	267.077.000	APBD		100%	538.121.000
2.	20.	02.	2.	01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Batam	100%	267.077.000	APBD		100%	538.121.000
2.	16.	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Batam	74,59%	9.045.116.050	APBD		74,59%	12.554.239.024
2.	16.	02.	2.	01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	Batam	100 %	9.045.116.050	APBD		100 %	12.554.239.024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	16.	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Batam	100%	20.114.649.858	APBD		100%	15.826.086.984
2.	16.	01.	2.	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Batam	100%	18.325.694.748	APBD		100%	13.139.937.572
2.	16.	01.	2.	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Batam	100%	351.674.900	APBD		100%	287.713.031
2.	16.	01.	2.	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	100%	209.338.000	APBD		100%	123.181.756
2.	16.	01.	2.	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Batam	100%	1.053.479.410	APBD		100%	1.811.668.000
2.	16.	01.	2.	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Batam	100%	23.635.800	APBD		100%	103.421.625
2.	16.	01.	2.	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Batam	100%	360.165.000	APBD		100%	360.165.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Pendanaan 2025 (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	20.114.649.858
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	18.325.694.748
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	351.674.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	209.338.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	1.053.479.410
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	23.635.800
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	360.165.000
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,59 %	9.045.116.050
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi	100 %	9.045.116.050

Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Pendanaan 2025 (Rp)
Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	sasaran penyebaran informasi public		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2. Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	1. 3,00 2. 4,00 3. 4,00	6.079.294.580
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	264	64.824.680
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	- Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola - Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3,25 4,00	6.014.469.900
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	267.077.000
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 %	267.077.000
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1. 3,00 2. 3,00	383.236.000
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	85,83 %	381.436.000

Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Pendanaan 2025 (Rp)
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	85.71 %	1.800.000
TOTAL			35.889.373.488

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2021 – 2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 merupakan bahan perencanaan dan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 yang didalamnya terdapat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kelompok sasaran dan pendanaan. Selain itu Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Pinangan Raja Kami Dambakan
Selembayung Pertanda Sembah Seru
Rancangan Akhir Renja Kami Persembahkan
Mendukung Perwujudan Batam Kota Baru

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI